



Implementasi Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Perdagangan Pemulihan Usaha Koperasi dan UMKM di Sekitar Kantor Walikota Medan

Alivia Azzahra^{1*}, Andri Soemitra²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : aliviaa628@gmail.com ^{1*}, andrisoemitra@gmail.com ²

Abstract, *Economic resilience is one of the important pillars in the development of a region. Medan City, as one of the economic centers in North Sumatra, has a strategic role in advancing the regional economy. Medan City, as one of the economic centers in North Sumatra, faces its own challenges in building local economic resilience, especially in the area around the Medan Mayor's Office, which is the center of government and economic activities. This article discusses the implementation of economic resilience through the enhancement of trade as well as the restoration of cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) businesses around the Medan Mayor's Office. The research aims to explore the various initiatives and strategies that have been implemented by the city government in supporting local economic development, particularly in the context of cooperatives and MSMEs. The results show the success of the program in supporting local economic growth, although there are challenges that still need to be addressed.*

Keywords: *Economic Resilience, Trade, Cooperatives, MSME*

Abstrak, Ketahanan ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu daerah. Kota Medan, sebagai salah satu pusat ekonomi di Sumatera Utara, memiliki peran strategis dalam memajukan perekonomian regional. Kota Medan, sebagai salah satu pusat ekonomi di Sumatera Utara, menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun ketahanan ekonomi lokal, terutama di daerah sekitar Kantor Walikota Medan, yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi. Artikel ini membahas implementasi ketahanan ekonomi melalui peningkatan perdagangan serta pemulihan usaha koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar Kantor Walikota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai inisiatif dan strategi yang telah diterapkan oleh pemerintah kota dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal, khususnya dalam konteks koperasi dan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan program tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meskipun terdapat tantangan yang masih perlu diatasi.

Kata Kunci : Ketahanan Ekonomi, Perdagangan, Koperasi, UMKM

1. PENDAHULUAN

Ketahanan nasional di sektor ekonomi tercermin dari berbagai situasi perekonomian suatu bangsa yang mampu menjaga kemandirian ekonominya. Dalam konteks ketahanan ekonomi, aspek ekonomi memiliki hubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi, yang melibatkan proses produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Ketahanan ekonomi adalah konsep yang semakin relevan dalam konteks globalisasi dan dinamika ekonomi yang cepat berubah. (Marlinah, 2017)

Landasan hukum Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Regulasi ini berfokus pada kebijakan keuangan dalam menangani pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menghadapi ancaman yang

berpotensi mengganggu perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan (Peraturan Pemerintah, 2020). Untuk mewujudkan Program PEN, negara perlu mengalokasikan dana yang cukup besar. Program ini didanai melalui lima sumber utama, yaitu: belanja negara, penempatan dana, penjaminan, penyertaan modal negara, dan investasi pemerintah. Adapun Program PEN memiliki enam kebijakan pokok, meliputi penanganan kesehatan, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perlindungan sosial, pembiayaan korporasi, serta program sektoral yang dijalankan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. (E et al., 2023).

Dalam beberapa dekade terakhir, perekonomian global telah mengalami berbagai guncangan, termasuk krisis finansial, fluktuasi harga komoditas, dan yang paling baru, pandemi COVID-19. Ketahanan ekonomi di tingkat lokal menjadi semakin penting, terutama di kota-kota besar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, seperti Medan. Ketahanan ekonomi lokal tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pasar dan investasi besar, tetapi juga oleh kemampuan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi dalam beradaptasi dan bertahan di tengah tantangan tersebut.

Kota Medan, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan pusat ekonomi di Sumatera Utara, memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian regional. Sebagai ibu kota provinsi, Medan adalah pusat perdagangan, jasa, dan industri yang menghubungkan daerah-daerah di sekitarnya dengan pasar nasional dan internasional. Di tengah peran strategis ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana ketahanan ekonomi kota ini dapat diperkuat, khususnya melalui pemberdayaan sektor UMKM dan koperasi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. (Marliyah, Nawawi M Zuhrinal, 2022)

Kawasan sekitar Kantor Walikota Medan, sebagai pusat pemerintahan kota, tidak hanya berfungsi sebagai simbol otoritas administratif, tetapi juga sebagai area vital untuk kegiatan ekonomi. Wilayah ini merupakan lokasi berbagai UMKM dan koperasi yang menyokong perekonomian lokal melalui penyediaan barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya sektor ini, perlu ada upaya yang terarah untuk memastikan bahwa UMKM dan koperasi di sekitar Kantor Walikota Medan dapat terus berkembang dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi kota secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, peningkatan perdagangan dan pemulihan usaha menjadi strategi utama yang diambil oleh pemerintah Kota Medan untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Peningkatan perdagangan, baik melalui perluasan pasar maupun penguatan infrastruktur, diyakini dapat membuka peluang baru bagi UMKM dan koperasi untuk tumbuh dan berdaya saing. Sementara itu, pemulihan usaha mengacu pada berbagai inisiatif untuk membantu pelaku

usaha yang terkena dampak krisis ekonomi atau bencana, seperti pandemi COVID-19, untuk bangkit kembali dan mencapai stabilitas.

Meski UMKM dan koperasi memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan ekonomi, mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangannya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap modal dan sumber daya. Banyak pelaku UMKM dan koperasi di Kota Medan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha yang cukup, baik dari lembaga keuangan formal maupun non-formal. Hambatan ini sering kali diperparah oleh rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku usaha kecil, yang membuat mereka kesulitan dalam menyusun proposal bisnis yang menarik bagi pemberi pinjaman. (Abdi et al., 2022)

Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi juga menjadi hambatan yang signifikan. Di era digital, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi kunci keberhasilan dalam bersaing di pasar global. Namun, banyak UMKM dan koperasi di sekitar Kantor Walikota Medan yang belum sepenuhnya mengadopsi teknologi digital dalam operasional bisnis mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk biaya adopsi teknologi yang tinggi, kurangnya pengetahuan tentang teknologi, serta ketidakmampuan untuk mengintegrasikan teknologi baru ke dalam proses bisnis yang ada.

Tantangan lain yang dihadapi adalah masalah regulasi dan birokrasi. Proses perizinan usaha, pengajuan bantuan modal, dan akses ke program-program pemerintah sering kali dipandang sebagai proses yang rumit dan memakan waktu. Birokrasi yang lambat dan kurang efisien dapat menghalangi pelaku usaha kecil untuk berkembang, terutama ketika mereka membutuhkan dukungan cepat untuk menanggapi perubahan kondisi pasar.

Lebih lanjut, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor UMKM dan koperasi. Banyak usaha kecil yang mengalami penurunan drastis dalam penjualan, beberapa bahkan terpaksa gulung tikar. Pemulihan dari dampak pandemi memerlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Namun, koordinasi ini sering kali sulit dicapai karena adanya perbedaan kepentingan, prioritas, dan sumber daya antara berbagai pemangku kepentingan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Ketahanan Ekonomi

Ketahanan dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah sistem untuk berhasil menyesuaikan diri terhadap tantangan yang mengancam. Ketahanan ekonomi merujuk pada

kapasitas masyarakat atau keluarga dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. (ROZALINDA et al., 2023)

Ketahanan ekonomi adalah konsep yang merujuk pada kemampuan suatu ekonomi untuk bertahan, pulih, dan berkembang di tengah guncangan eksternal maupun internal. Menurut Rose (2007), ketahanan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem ekonomi untuk mempertahankan fungsi dasar dan kembali ke kondisi stabil setelah mengalami gangguan. Konsep ini mencakup dua aspek utama: ketahanan resistensi, yaitu kemampuan untuk mengurangi dampak langsung dari gangguan, dan ketahanan pemulihan, yaitu kemampuan untuk pulih dengan cepat setelah gangguan terjadi.

Ketahanan ekonomi sangat relevan dalam konteks perkotaan, di mana dinamika ekonomi sering kali dipengaruhi oleh fluktuasi pasar global, perubahan kebijakan, dan bencana alam. Dalam hal ini, UMKM dan koperasi memainkan peran penting karena mereka berkontribusi pada diversifikasi ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penyediaan barang serta jasa yang esensial bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, ketahanan ekonomi di tingkat lokal, seperti di Kota Medan, tidak dapat dilepaskan dari peran sektor UMKM dan koperasi.

B. Peningkatan Perdagangan Sebagai Strategi Ketahanan Ekonomi

Peningkatan perdagangan merupakan salah satu strategi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Perdagangan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, menciptakan peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar, meningkatkan volume penjualan, dan memperkuat daya saing. Menurut Porter (1985), strategi keunggulan kompetitif yang berfokus pada perdagangan dapat membantu bisnis, termasuk UMKM, untuk bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif.

Di Kota Medan, peningkatan perdagangan lokal menjadi sangat penting mengingat perannya sebagai pusat ekonomi di Sumatera Utara. Perdagangan lokal yang kuat dapat memperkuat ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada pasar eksternal, dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan ekonomi global. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perdagangan, termasuk melalui penyediaan infrastruktur, pengurangan hambatan regulasi, dan promosi produk lokal.

Literatur menunjukkan bahwa keterlibatan UMKM dalam perdagangan lokal dapat meningkatkan ketahanan ekonomi komunitas. Studi oleh Beck, Demircuc-Kunt, dan Levine (2005) menemukan bahwa UMKM yang terlibat dalam perdagangan lebih cenderung bertahan dalam jangka panjang dibandingkan dengan yang beroperasi dalam pasar yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh peningkatan eksposur terhadap berbagai pasar, yang memungkinkan diversifikasi pendapatan dan pengurangan risiko.

C. Peran Koperasi dalam Ketahanan Ekonomi

Koperasi adalah entitas ekonomi yang dimiliki dan dikelola secara kolektif oleh anggotanya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan ekonomi bersama. Koperasi memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan ekonomi karena mereka mempromosikan solidaritas, berbagi risiko, dan akses yang lebih luas ke sumber daya bagi anggotanya. Sebagai contoh, koperasi sering kali mampu menawarkan harga yang lebih stabil dan adil untuk produk pertanian dibandingkan dengan pasar komersial biasa, karena mereka beroperasi berdasarkan prinsip non-profit dan keuntungan bersama.

Sebagai penyelenggara, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mendukung UMKM dalam mencapai sasaran pengembangan usaha mereka. Apabila UMKM menghadapi kendala dalam aspek produksi, peran penyelenggara adalah untuk memperkuat kapabilitas UMKM melalui berbagai metode, seperti penyediaan pelatihan. Begitu pula, jika UMKM mengalami kesulitan dalam hal pendanaan, tugas penyelenggara adalah membantu menemukan solusi agar UMKM dapat memperoleh pendanaan yang diperlukan, dengan tetap menjaga agar UMKM tidak terlalu bergantung pada bantuan tersebut. (Auliya & Arif, 2021).

Koperasi dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi lokal dengan memberikan dukungan kepada anggotanya dalam bentuk pembiayaan, pelatihan, dan akses ke pasar. Di banyak negara, koperasi telah terbukti sebagai alat yang efektif untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat komunitas, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi konvensional.

Di Indonesia, koperasi telah lama dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Dalam konteks Kota Medan, koperasi berfungsi sebagai sarana penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal dengan mengorganisir usaha-usaha kecil dan menengah dalam kerangka kerja yang lebih terstruktur dan kolaboratif. Hal ini memungkinkan para anggotanya untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar daripada jika mereka beroperasi secara individu.

D. Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Lokal

UMKM adalah tulang punggung perekonomian di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Mereka menyumbang secara signifikan terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020).

Literatur tentang UMKM menyoroti pentingnya mereka dalam mempromosikan inklusi ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi. UMKM sering kali menjadi sumber pendapatan utama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah, serta berperan

penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Studi oleh Tambunan (2019) menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia mampu bertahan lebih baik dalam krisis ekonomi dibandingkan dengan perusahaan besar, karena fleksibilitas mereka dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah jenis kegiatan ekonomi yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan menyediakan layanan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. UMKM juga berkontribusi pada proses pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional. (Saragih, 2023)

Kebijakan pemerintah pusat untuk pemulihan usaha UMKM diwujudkan melalui pemberian subsidi bunga, subsidi penjaminan, serta penempatan dana pemerintah di bank. Langkah ini membantu mengurangi beban bagi debitur yang telah mengambil kredit program dan sedang menjalani restrukturisasi kredit. (Mardanugraha & Akhmad, 2023). Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses ke pembiayaan, teknologi, dan pasar. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mendukung UMKM menjadi sangat penting, terutama dalam menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan inovasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks, seperti ketahanan ekonomi, yang melibatkan berbagai aktor, kebijakan, dan dinamika sosial-ekonomi. Desain studi kasus dipilih untuk memberikan fokus yang tajam pada konteks spesifik, yaitu di sekitar Kantor Walikota Medan, yang merupakan area dengan konsentrasi tinggi UMKM dan koperasi yang berperan dalam perekonomian lokal. Lokasi penelitian ini adalah kawasan sekitar Kantor Walikota Medan, yang dianggap sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi lokal. Wilayah ini dipilih karena memiliki konsentrasi UMKM dan koperasi yang signifikan, serta merupakan daerah yang strategis dalam konteks kebijakan ekonomi lokal.

Observasi langsung dilakukan di sekitar Kantor Walikota Medan untuk memahami kondisi ekonomi dan sosial secara nyata. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati aktivitas perdagangan, interaksi antara pelaku usaha, serta implementasi kebijakan di lapangan. Penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen, termasuk kebijakan pemerintah, laporan tahunan koperasi, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan riset sebelumnya yang relevan. Analisis dokumen ini membantu dalam memahami konteks kebijakan dan

kerangka regulasi yang mempengaruhi UMKM dan koperasi. Dengan pendekatan yang sistematis dan berfokus pada konteks lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil kebijakan dan pelaku usaha dalam memperkuat ketahanan ekonomi di wilayah ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi UMKM dan Koperasi di sekitar Kantor Walikota Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM dan koperasi di sekitar Kantor Walikota Medan memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan ekonomi lokal. Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha, sebagian besar UMKM di kawasan ini bergerak di sektor perdagangan dan jasa, dengan beberapa di antaranya beroperasi di sektor manufaktur kecil. Para pelaku usaha melaporkan bahwa bisnis mereka umumnya berskala kecil, dengan jumlah karyawan yang terbatas, dan sangat bergantung pada pasar lokal.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, terdapat 84.284 unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. Angka tersebut meliputi 82.931 unit usaha mikro, 1.258 unit usaha kecil, dan 95 unit usaha menengah. Sebagian besar UMKM beroperasi di sektor perdagangan, disusul oleh sektor jasa dan industri pengolahan. Total tenaga kerja yang diserap oleh UMKM di Kota Medan mencapai 235.481 orang. Data ini mengindikasikan bahwa UMKM memainkan peran penting dalam ekonomi Kota Medan sebelum terjadinya pandemi Covid-19. (Matondang et al., 2024)

Dalam rangka mendukung dan mengembangkan UMKM di kota Medan, khususnya di lingkungan Kantor Walikota Medan, Bapak Walikota Medan memperkenalkan sebuah platform belanja daring yang mengintegrasikan seluruh divisi terkait konsumsi di Kantor Walikota dengan sejumlah pelaku usaha UMKM sebagai penyedia konsumsi. Platform ini dikenal dengan sebutan E-Catalog. (Manurung & Harahap, 2022).

Menurut salah satu narasumber yang memiliki UMKM di wilayah Kantor Walikota Medan, sistem E-Catalog dinilai efektif dalam pemesanan kebutuhan konsumsi yang diperlukan oleh Kantor Walikota Medan. Ia juga menambahkan bahwa selama pandemi COVID-19, inisiatif Pak Bobby untuk mendorong pengembangan UMKM sangat membantu masyarakat di Kota Medan. Selain itu, E-Catalog memungkinkan UMKM untuk menampilkan informasi tentang kualitas, kuantitas, harga produk, serta memberikan kemudahan bagi pihak kantor dalam memilih menu yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Koperasi di daerah ini, meskipun lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan UMKM, telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung stabilitas ekonomi anggota mereka. Koperasi tersebut berperan dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih

terjangkau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, serta dalam memfasilitasi pengadaan bahan baku dan pemasaran produk secara kolektif. Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa UMKM dan koperasi di sekitar Kantor Walikota Medan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan modal, kurangnya akses teknologi, dan rendahnya literasi digital. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi daya saing mereka, terutama di tengah meningkatnya persaingan di pasar.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Dewi, 2024) yang menyebutkan bahwa dalam penerapan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan, dibutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak yang berkepentingan, terutama para pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang berkeinginan untuk memperluas usahanya sering kali mengalami kendala terkait modal usaha. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan telah tercapai, sumber daya telah tersedia, dan pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pihak yang tepat, koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain diperlukan. Sementara kondisi ekonomi mendukung pelaksanaan kebijakan, pelaku UMKM masih belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dalam usahanya.

Strategi Peningkatan perdagangan

Peningkatan perdagangan lokal merupakan salah satu strategi utama yang digunakan oleh UMKM dan koperasi di kawasan ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pelaku usaha aktif dalam mencari peluang perdagangan baru, baik di pasar lokal maupun regional. Banyak dari mereka telah mulai memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar, meskipun adopsi teknologi digital masih terbatas pada sebagian kecil UMKM yang lebih muda dan memiliki akses ke pelatihan teknologi.

Pemerintah Kota Medan, melalui kebijakan perdagangan dan promosi produk lokal, juga berperan dalam mendukung strategi peningkatan perdagangan ini. Sebagai contoh, program pasar murah dan bazar UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat telah memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk mempromosikan produk mereka kepada khalayak yang lebih luas. Inisiatif ini membantu meningkatkan visibilitas produk lokal, yang pada gilirannya dapat memperluas basis pelanggan dan meningkatkan pendapatan.

Namun, beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa masih ada hambatan dalam hal regulasi dan birokrasi yang menghalangi akses ke pasar yang lebih luas. Hambatan-hambatan ini termasuk perizinan yang rumit, biaya distribusi yang tinggi, serta kurangnya dukungan dalam pengembangan jaringan distribusi yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, hasil ini mendukung temuan dari literatur bahwa peningkatan perdagangan, khususnya perdagangan lokal, merupakan strategi yang efektif untuk

memperkuat ketahanan ekonomi (Porter, 1985). Namun, efektivitas strategi ini masih bergantung pada dukungan kebijakan yang konsisten dan pengurangan hambatan administratif.

Pemulihan usaha pasca kritis

Pemulihan usaha di sekitar Kantor Walikota Medan terutama berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara, banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan yang signifikan selama pandemi. Namun, beberapa UMKM yang memiliki akses ke program bantuan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pemulihan ekonomi, melaporkan adanya peningkatan kembali dalam aktivitas bisnis mereka.

Bagi para pelaku usaha yang menerima pembinaan dan bantuan modal, mereka dapat mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan, serta memperbaiki kualitas produk kuliner yang mereka kelola. Dari sisi ekonomi, keuntungan yang dirasakan adalah perluasan usaha, sementara dari sisi sosial, pembinaan mendorong mereka untuk lebih aktif bergabung dalam komunitas, sehingga dapat saling berbagi pengalaman dalam menjalankan usaha. Selain menjadi sumber informasi, komunitas juga berfungsi sebagai wadah promosi untuk memperkenalkan produk mereka, yang dilengkapi dengan inovasi yang didorong oleh pemerintah. (Harahap et al., 2022)

Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari program pemulihan ekonomi yang disediakan oleh pemerintah, meskipun ada beberapa kendala dalam akses ke bantuan, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memiliki dokumentasi formal atau izin usaha yang lengkap. Responden yang memperoleh bantuan keuangan melalui KUR menyebutkan bahwa bantuan tersebut sangat membantu dalam menutupi biaya operasional, termasuk penggajian karyawan dan pembelian bahan baku.

Selain bantuan keuangan, program pelatihan dan pendampingan bisnis yang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga dinilai bermanfaat oleh para pelaku usaha. Program-program ini membantu mereka meningkatkan keterampilan manajerial, literasi digital, dan pemasaran produk. Namun, terdapat kebutuhan yang lebih besar untuk program yang berkelanjutan dan terfokus pada pengembangan kapasitas yang lebih spesifik bagi UMKM di sektor tertentu.

Temuan ini sesuai dengan studi oleh Donthu dan Gustafsson (2020) yang menunjukkan bahwa dukungan pemulihan usaha yang memadai memungkinkan UMKM untuk pulih lebih cepat setelah mengalami krisis. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua UMKM mendapatkan manfaat yang sama dari program pemulihan, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam aksesibilitas dan efisiensi distribusi bantuan.

Peran koperasi dalam mendukung pemulihan ekonomi

Koperasi di sekitar Kantor Walikota Medan juga memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan pengurus koperasi, koperasi telah memberikan dukungan yang beragam kepada anggotanya selama masa krisis, termasuk melalui penyediaan modal pinjaman dengan bunga rendah dan pembelian bersama bahan baku yang diperlukan untuk kelangsungan usaha.

Beberapa koperasi bahkan melakukan inovasi dengan mengembangkan model bisnis baru, seperti memperkenalkan layanan digital untuk memfasilitasi transaksi dan pengelolaan usaha anggota. Inisiatif ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi anggota koperasi dalam mengelola usaha mereka di tengah tantangan yang dihadapi.

Namun, terdapat pula beberapa tantangan yang dihadapi koperasi, seperti keterbatasan modal yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri untuk memberikan dukungan yang lebih luas. Beberapa pengurus koperasi mengungkapkan perlunya peningkatan dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk bantuan keuangan maupun pelatihan teknis untuk memperkuat operasional koperasi.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa koperasi dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan memfasilitasi pemulihan usaha (Birchall & Ketilson, 2009). Namun, keberhasilan koperasi dalam mendukung pemulihan ekonomi sangat bergantung pada kapasitas internal koperasi dan dukungan eksternal yang memadai.

5. PENUTUP

Penelitian ini mengkaji implementasi ketahanan ekonomi melalui peningkatan perdagangan, pemulihan usaha, serta peran koperasi dan UMKM di sekitar Kantor Walikota Medan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sektor UMKM dan koperasi memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi lokal, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan krisis seperti pandemi COVID-19. Peningkatan perdagangan, baik secara lokal maupun melalui digitalisasi, terbukti menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sementara program pemulihan usaha yang diterapkan pemerintah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha yang terdampak krisis.

Koperasi berperan signifikan dalam menyediakan akses keuangan dan sumber daya bagi anggotanya, yang membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih harus diatasi, seperti keterbatasan akses modal, kurangnya literasi digital, serta hambatan regulasi dan birokrasi yang menghambat pengembangan usaha.

Dari sudut pandang kebijakan, penelitian ini menekankan perlunya dukungan yang lebih berkelanjutan dan terstruktur dari pemerintah dalam bentuk program pemulihan ekonomi, pelatihan, serta peningkatan infrastruktur digital untuk UMKM dan koperasi. Pemerintah juga perlu menyederhanakan regulasi yang terkait dengan perdagangan dan memperluas akses bantuan bagi pelaku usaha di sektor informal.

REFERENSI

- Abdi, M. C., Soemitra, A., & Daulay, A. N. (2022). Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Pada Umkm Dan Upaya Pemerintah Dalam Menyelamatkan Umkm Di Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Medan. *Jurnal Economic Edu*, 2(2), 41–53.
- Auliya, A. N., & Arif, L. (2021). Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk ...*, 8(1), 22–31. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1416>
- Dewi, S. M. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA*. 1–17.
- E, M. E., Masinambow, V. A. J., & Sumual, J. I. (2023). Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Sektor Umkm Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Manado. *Berkala Ilmiah Efisisensi*, 23(10), 49–60.
- Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Sugiarto, E. (2022). *Industri Kreatif UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 8(02), 1991–1997.
- Manurung, F. E., & Harahap, M. I. (2022). Strategi Walikota Medan dalam Meningkatkan UMKM di Kota Medan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1365–1371.
- Mardanugraha, E., & Akhmad, J. (2023). Ketahanan UMKM di Indonesia menghadapi Resesi Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 30(2), 101–114. <https://doi.org/10.14203/jep.30.2.2022.101-114>
- Marlinah, L. (2017). Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan

Ekonomi Kreatif. *Jurnal Cakrawala: Ejournal.Bsi.Ac.Id*, 17(2), 258–265.
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/cakrawala/article/view/2488>

Marliyah, Nawawi M Zuhri, J. H. (2022). Strategi Peningkatan Ekonomi dan Tinjauan Ekonomi Islam Masa Covid 19 (Studi Kasus: UMKM di Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2027–2035.

Matondang, E. S., Siregar, M., Nasution, M., & Andriati, S. L. (2024). Analisis Kebijakan Hukum dan Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional: Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 45–64. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.276>

ROZALINDA, R., PUTRI, R. A., & MARDIAH, N. (2023). Ketahanan Ekonomi Keluarga Pelaku Usaha Kecil Mikro Perempuan Di Kabupaten Padang Pariaman. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 7. <https://doi.org/10.15548/jebi.v7i1.266>

Saragih, R. F. (2023). *Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pelaku UMKM Untuk Pertumbuhan Ekonomi*. 1(4).